



80 Persen Pasokan Air RSUP Sanglah dari Sumur Bor

Denpasar (Bali Post) -

Mengantisipasi musim kemarau yang terjadi di bulan April-Oktober, pasokan air RSUP Sanglah berasal dari dua sumur bor yang dimiliki, selain juga menggunakan jasa PDAM. Sebagian besar sumber air telah di-back up dengan air bawah tanah melalui beberapa sumur kemudian didistribusikan. "Barang kali persentase pemakaian air dari PDAM sudah kecil," ujar Direktur Umum dan Operasional dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, M.M., MARS., Selasa (11/8) kemarin.

Sekretaris Manajer Fasilitas Bagian Sanitasi RSUP Sanglah I Ketut Gede Surata menambahkan, berdasarkan data pemakaian air per hari di RSUP Sanglah sekitar 525-600 meter kubik. Pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air didapat dari PDAM sebesar 20 persen dan 80 persen dari sumur bor dalam yang dibuat. "Yang menggunakan dari PDAM, full dari IGD tetapi juga di-back up dari sumur bor karena sewaktu-waktu PDAM itu bermasalah, kecil debitnya terutama saat melakukan perbaikan-perbaikan di jaringan induk, sementara tidak ada pemberitahuan," jelasnya.

Hal itu yang menyebabkan pasokan air ke IGD menjadi terhambat sehingga

pelayanan sedikit terganggu. Namun, sekarang telah diantisipasi dengan membuat sumur dalam, jika seandainya PDAM mengalami gangguan. Sumber air PDAM tersebut disimpan dalam *ground tank* dan akan bekerja secara otomatis apabila air PDAM mati sehingga air dari sumur bor dapat langsung masuk. Ada tiga sumur yang dimiliki, namun hanya dua yang mendapat izin karena secara konstruksi baru dua sumur yang memenuhi syarat. "Sedangkan satu sumur belum memenuhi syarat, masih disempurnakan," imbuh Suarthana.

Tiga sumur tersebut terletak di dekat ruangan KOAS di sektor barat, satu di sektor utara, dan satu lagi belum digunakan karena belum berizin yang letaknya di dekat Unit Gizi. Menurut Surata, pihaknya harus melakukan pendugaan terlebih dahulu, lapisan mana yang akan dicari dan merencanakan sistem konstruksi. Dikatakan, sistem konstruksi yang digunakan sudah murni menggunakan sistem *blocking*. "Kami mencari lapisan *aquiver*, air yang berada di lapisan bawah tanah, itu yang dipakai," ujarnya.

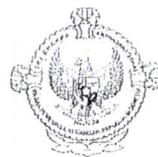
Sebelum ditampung dalam *ground tank*, air diproses berupa *filtering* dengan menggunakan karbon aktif dan klorin, baru didistribusikan dengan

menggunakan pompa *variable speed*. Pada beberapa tempat tertentu seperti ruang OK, HD, lab dan lain-lain, air dari tempat penampungan di RSUP Sanglah memang dilakukan pengolahan lanjutan dengan menggunakan alat RO sehingga kualitas air yang dibutuhkan oleh ruangan tertentu itu sesuai dengan standar yang ada karena RO itu, sistem pelunakan air untuk menurunkan kadar garam yang ada dalam air.

Dengan adanya dua sumur bor dan jasa air PDAM, untuk sementara kebutuhan air di RSUP Sanglah tercukupi. Tetapi, mengingat pengembangan RSUP Sanglah ke depan dengan 800 tempat tidur, maka perlu penambahan satu sumur sehingga dapat memenuhi debit yang diharapkan. Karena dengan standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes, pemakaian 500 liter per hari per tempat tidur, tetapi kondisi aktual dan sesuai pencatatan, pemakaian air sudah melebihi. Selain itu, saat ini RSUP Sanglah yang merupakan rumah sakit tipe A, pemakaian airnya sudah mendekati 1.000 liter per hari per tempat tidur. "Untuk kapasitas 700 tempat tidur, untuk sementara bisa dipenuhi, tetapi kalau mau tambah tempat tidur ke 800 atau 1.000 perlu penambahan pasokan itu," ujarnya. (kmb42)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 2



APBD Perubahan Ketok Palu 18 Agustus

Denpasar (Bali Post) -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 akan diketok palu DPRD Bali, 18 Agustus mendatang. Kepastian ini disampaikan Ketua Pansus APBD Perubahan 2015, I Made Budastra, Selasa (11/8) kemarin. Budastra juga menjelaskan bila lamanya pembahasan APBD Perubahan 2015 lantaran proses penyesuaian yang cukup memakan waktu.

"APBD perubahan masih terjadi penyesuaian antara lampiran APBD perubahan karena itu merupakan bagian yang harus disahkan oleh DPRD. Jadi, pada persoalan penyesuaian itu kami masih membutuhkan waktu 1-2 hari," ujarnya.

Budastra menambahkan, saat ini sudah tidak ada persoalan mendasar yang menghambat penetapan APBD Perubahan 2015. Format struktur anggaran, baik pendapatan dan biaya dikatakan sudah paten. Meski kegiatan-kegiatan belanja yang ada di dalamnya masih perlu disinkronkan. Utamanya terkait usulan masyarakat untuk hibah agar tidak ada yang tercecer.

Masalah hibah sebelumnya sempat dipersoalkan dewan. Pasalnya, usulan dana hibah yang direkomendasi dewan sebagian besar tidak dimasukkan oleh eksekutif. Sementara eksekutif justru memasukkan dana hibah dari Bagian Umum Setda Provinsi Bali. Tak pelak, dewan lantas menyebut alokasi itu sebagai dana siluman.

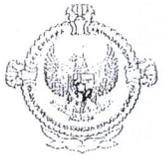
Gubernur Bali Made Mangku Pastika membantah dengan menyebut semua hibah itu memang dialokasikan setiap tahun. "Itu sebenarnya bukan dana siluman. Itu semua hibah yang memang harus berdasarkan undang-undang. Contoh ke KONI, PMI, pramuka, yang begitu-begitu, PKK, yang sudah wajib, itu wajib. Kepada purnawirawan, veteran, dsb. Itu kan bukan siluman, memang tiap tahun ada. Jadi jangan keliru dan itu bukan eksekutif, bukan saya punya, bukan," ujarnya.

Di sisi lain, Pastika mengaku sudah mengakomodir semua hibah yang diusulkan dewan. Pernyataannya dikuatkan oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry. Menurutnya, persoalan hibah tidak ada klausulnya di dewan. Jadi, dewan sebagai wakil rakyat hanya memfasilitasi kalau ada aspirasi dari bawah.

"Itu disampaikan kepada eksekutif, sesuai dengan prosedur melalui proposal. Proposalnya itu diverifikasi oleh eksekutif. Diterima atau tidak, diloloskan atau tidak itu adalah kewenangan eksekutif. Itu intinya, jadi tidak ada istilahnya jatah sekian," ujarnya. (kmb32)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 7



Dari Pemeriksaan Kinerja BPK-RI di Badung Sekda Badung Ekspos SAPD Berbasis Akrua



EKSPOSE - Sekda Badung Kompyang R. Swandika bersama Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Bali Amri Lewa, M.Adv., Acc., CA.

PEMERINTAH Kabupaten Badung menggelar ekspos dalam rangka Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrua di Kabupaten Badung. Ekspose SAPD berbasis akrua ini disampaikan oleh Sekda Badung Kompyang R. Swandika di hadapan Tim Pemeriksa Kinerja Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali yang dipimpin Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Bali Amri Lewa, M.Adv., Acc., CA. di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Selasa (11/8) kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri para asisten, staf ahli, pimpinan SKPD, para camat dan lurah se-Badung.

Sekda Badung Kompyang R. Swandika menyampaikan, tim pengendali teknis pemeriksa BPK-RI Perwakilan Bali turun ke Kabupaten Badung untuk melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan arahan dan pendampingan terkait dengan perintah undang-undang di mana pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan pembukuan berbasis akrua khususnya di Badung. Dikatakan, akrua basis adalah basis akuntansi di mana pencatatan pembukuan, pengaturan atas peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan dalam laporan keuangan harus memperhatikan apakah sudah menjadi penerimaan atau sudah diba-

yarkan. "Jadi perintah UU ini menjadi pedoman dasar kami melaksanakan, mengkritik pencatatan, penatausahaan dan pelaporan baik terkait dengan keuangan, pendapatan dan aset. Sehingga per 1 Januari 2015 siap tidak siap Pemkab Badung telah melaksanakan pembukuan, pencatatan dan monitoring berbasis akrua," jelasnya.

Keputusan yang diambil ini juga didasari atas terlaksananya MoU antara Pemkab Badung atas dukungan Dewan dengan BPK-RI terkait audit berbasis akrua. Lebih lanjut dijelaskan, dalam upaya pelaksanaan akrua basis ini, Pemkab Badung merasa lebih ada kesiapan, hal ini didasari atas spirit pemerintah dan adanya pendampingan dari BPK, BPKP maupun Pusdiklat Kemendagri mengenai akrua basis ini. Terkait dengan kebijakan, Pemkab Badung telah menerbitkan Perbup Nomor 33 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi di daerah. perbup ini sebagai panduan bagi SKPD untuk melaksanakan akrua basis. Selain itu, Pemkab Badung juga menerbitkan Perbup Nomor 32 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. "Terhadap dua perbup ini, kita implementasikan dalam penyesuaian atas aplikasi sistem akuntansi yang kita miliki dan juga barang milik daerah," terangnya dan menambahkan, untuk penguatan, SKPD diberikan Bimtek pelaksanaan akrua basis baik terkait dengan

keuangan maupun barang milik daerah.

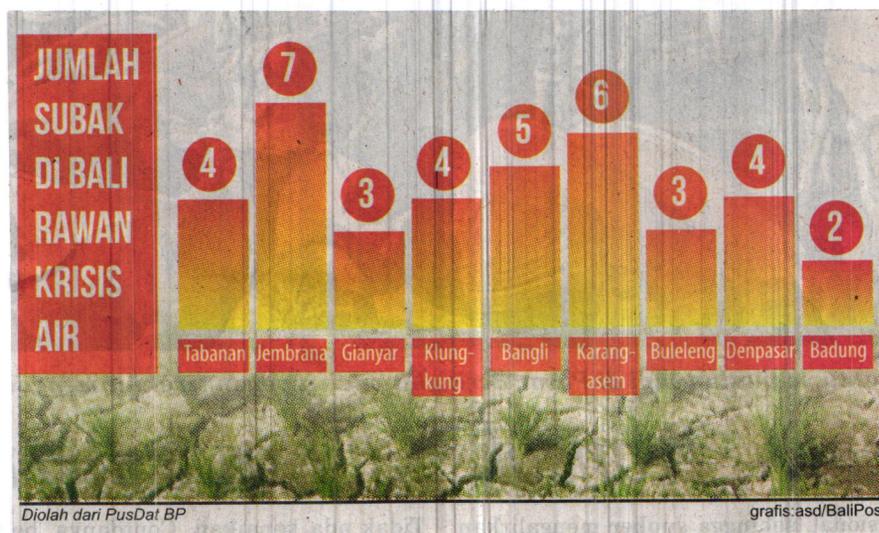
Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Bali Amri Lewa menerangkan, tim pemeriksa dari BPK-RI Perwakilan Bali telah melakukan pemeriksaan kinerja selama 24 hari di Kabupaten Badung. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pengolahan data selama dua minggu serta pemeriksaan terinci. "Kami berharap, dengan melihat upaya-upaya implementasi SAPD berbasis akrua ini akan mampu mewujudkan tata kelola keuangan terutama dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah yang efektif serta meningkatkan ef-

esiensi, termasuk akan mampu mengukur nilai persediaan serta aset daerah. Dengan penerapan akrua basis ini akan mampu mewujudkan keseimbangan antargenerasi. Seperti masalah aset, kita dapat menggunakan dan melihat aset itu manfaatnya tinggal berapa," katanya.

Dalam pemeriksaan ini diharapkan SKPD dapat memberikan informasi apa adanya. Pihaknya akan mengambil beberapa sampel SKPD untuk melihat penerapan standar akuntansi ini dengan cara wawancara, melihat proses yang dilakukan atau mengajukan kuisioner. "Pemeriksaan ini sangat bermanfaat karena akan membantu pemeriksaan berikutnya yakni pemeriksaan LKPD berlanjut pada opini," pungkasnya. (ad850)



Di Karangasem Embung Banyak Bocor, Krisis Air Berlanjut



PEMBANGUNAN embung (penampung air hujan) di Karangasem tak banyak membantu warga saat

musim kering. Sebab, banyak embung yang tak berfungsi karena bocor. Solusinya, sejak sebulan lalu masyarakat di Seraya dan Kubu pegunungan terpaksa membeli air.

Anggota DPRD asal Tianyar, Kubu, Karangasem Nyoman Musna Antara dan Wakil Ketua DPRD Karangasem Nyoman Karya Kartika mengatakan, setiap tahun sejumlah wilayah di pegunungan mengalami krisis air. "Bagi yang memiliki uang, mereka membeli air, ada juga yang mengajukan bantuan mohon air bersih," kata Antara.

Hal. 19
Rp 300 Ribu

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Rp 300 Ribu

Dari Hal. 1

Karya Kartika asal Desa Ban mengatakan, warga di pegunungan sudah sebulan lalu krisis air bersih. "Kami di rumah per tangki beli air Rp 150 ribu. Namun yang di perbukitan atau pegunungan yang jaraknya lebih jauh bisa membeli air Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per tangki," katanya.

Klian Banjar Dinas Tirtasari, Kubu, Ketut Kerta, mengakui warganya telah kesulitan air. "Kalau warganya di tepi pantai di Tirtasari tak kesulitan air. Soalnya, di tepi pantai ada sumur, walaupun airnya payau. Sementara warga di pegunungan seperti di Batu Meyeh, Peradi dan Munti Gunung sudah krisis air bersih," jelasnya.

Ketut Kerta mengakui proyek pipanisasi air Telaga Waja memang sudah sampai ke wilayahnya di Kubu. Namun sampai kini airnya belum mengalir.

Karya Kartika mengatakan, selain proyek pipanisasi air Telaga Waja belum mengalir, proyek pipanisasi seperti dari mata air Kesian di Banjar Daya, Ban, Kubu, juga tak efektif. Padahal,

pipanisasi mata air itu menelan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Selain dari APBD Karangasem digelontorkan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg lima tahun lalu, juga banyak bantuan anggaran dari LSM.

Proyek embung pun, kata Karya Kartika, juga banyak yang tidak efektif. Embung di Daya, Ban yang biayanya dari APBD Bali sebesar Rp 3 miliar, airnya tak bisa dikonsumsi untuk rumah tangga. Demikian juga embung yang dibangun di tengah hutan di Puragae, Pempatan, Rendang.

Proyek embung Datah 2 di Kedampal dananya Rp 9 miliar, embung di Dukuh, Kubu, serta di Bukit, Karangasem belum berisi air. Embung di Datah 2 dan di Bukit bocor, sementara yang di Dukuh tak berisi air karena saluran pipa dan penyadap airnya di Gunung Agung tersumbat bekas abu kebakaran hutan musim kemarau tahun lalu. Embung di bawah Pura Pasar Agung, Desa Sebudi juga tak efektif. Sebab, pipa penghubungnya hancur digilas alat berat pembukaan proyek jalan dan hingga kini belum diperbaiki. (013)



Bali Post/nik

TANPA IZIN - Penurunan reklame tanpa izin yang baru dipasang, Selasa (11/8) kemarin.

Dihentikan, Pemasangan Reklame Tanpa Izin

Gianyar (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar menghentikan pemasangan reklame ukuran besar tanpa izin di simpang empat By-pass I.B. Mantra, Desa Ketewel, Sukawati, Selasa (11/8) kemarin. Dalam penindakan ini, petugas juga mengamankan satu genset yang hendak digunakan untuk memasang reklame ukuran 4×8 m tersebut. Sementara pemilik reklame sudah dijatuhi surat peringatan.

Penertiban ini melibatkan belasan petugas Satpol PP Gianyar. Kedatangan petugas ini mengejutkan tiga orang buruh yang saat itu dalam proses memasang reklame ukuran 4×8 m tersebut. Namun karena sudah dipastikan belum mengantongi izin, reklame yang sudah hampir terpasang pada ketinggian sekitar 10 meter tersebut kembali diturunkan, selanjutnya diangkut ke Kantor Satpol PP Gianyar. Kasi Operasional Trantib, I Wayan Suala Susila, mengatakan, sebelumnya pemilik reklame sudah mendapat peringatan dari Satpol PP Gianyar. Namun, peringatan tersebut tidak digubris dan tetap melakukan pemasangan reklame. "Karena tidak menghiraukan peringatan dari petugas, terpaksa baliho tersebut diturunkan," tegas Suala Susila.

Ditambahkannya, penertiban reklame yang dilakukan merupakan kegiatan rutin dari Satpol PP Pemkab Gianyar, sebagai salah satu upaya nyata penegakan peraturan daerah khususnya pajak reklame yang menjadi bagian dari pajak daerah. Dengan langkah ini diharapkan mengurangi kebocoran dari pajak reklame serta para pelaku usaha dapat menyadari akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. (kmb35)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 9



Dituntut 1,5 Tahun Kaur Kesra Melinggih Minta Dibebaskan

Denpasar (Bali Post) -

Dituntut 1,5 tahun, mantan Kaur Kesra Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, terdakwa Anak Agung Bagus Semaraputra, melakukan pembelaan atau pledoi, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi beras miskin, Selasa (11/8) kemarin.

Dalam pledoi yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili, kuasa hukum terdakwa, Wayan Mudita dkk. menyatakan jaksa tidak bisa membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan sehingga minta kliennya dibebaskan dari semua tuntutan. "Mohon majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan," tandas pengacara terdakwa.

Alasannya, jaksa tidak mampu memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Di antaranya terkait barang bukti uang yang disebut jaksa sebagai hasil penjualan beras miskin oleh terdakwa. "Waktu jaksa menghadirkan saksi tidak bisa menghadirkan barang bukti uang Rp 2,5 juta yang katanya hasil penjualan beras miskin," jelasnya.

Selain itu, dalam audit yang dilakukan BPKP dinyatakan ada kerugian negara hingga Rp 135 juta. Padahal dalam ketentuan BPKP sudah tidak bisa lagi melakukan audit untuk menentukan kerugian negara. "Jadi, kami anggap banyak unsur yang tidak bisa dibuktikan jaksa dalam persidangan," tegasnya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 7



KRISIS AIR MEMBAYANGI BALI (2-HABIS)

Tata Kelola Bisnis Air Harus Diawasi

BISNIS air di Bali harus segera dikendalikan. Langkah ini diharapkan membantu kesinambungan ketersediaan air bersih bagi penduduk Bali. Selain pendekatan regulasi, dua lembaga bisnis yang menjadikan air sebagai produk jual -- PDAM dan pengelola Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) -- harus didesak melakukan investasi.

Hal. 19
Kawasan Hulu



PELANGGAN PDAM DI KABUPATEN/KOTA 2015

Buleleng	43.169	- daftar tunggu : 983
Tabanan	55.462	- daftar tunggu : 52
Karangasem	29.000	- daftar tunggu : 2.000
Klungkung	25.439	- daftar tunggu : 43
Bangli	14.384	- daftar tunggu : 40
Denpasar	78.418	- daftar tunggu : 5.137
Jembrana	21.917	- daftar tunggu : 393
Gianyar	53.884	- daftar tunggu : 2.633
Badung	65.000	- daftar tunggu : 2.000

Diolah dari PusDat BP

grafis:asd/BaliPost

Kawasan Hulu

Dari Hal. 1

Dua lembaga ini wajib menyisihkan keuntungannya untuk menjaga ekosistem kawasan hulu dan memperluas wilayah tangkapan air hujan. Jika ini gagal dilakukan, penduduk Bali akan menghadapi kenyataan pahit; krisis air bersih.

Isyarat ini dilontarkan Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud Dr. I Made Sudarma, M.S. Menurutnya, kepedulian terhadap kesinambungan ketersediaan air di Bali harus mendapat perhatian serius semua komponen. "Mencermati tata kelola air di Bali, kami kalangan akademisi miris. Solusi untuk keluar dari ancaman krisis air harus segera dirumuskan," ujarnya mengawali perbincangan dengan *Bali Post*, Selasa (11/8) kemarin. Fakta bahwa kini banyak subak krisis air serta mengeringnya sejumlah sumber mata air, menurut dosen Fakultas Pertanian Unud ini, harus dijadikan isyarat awal bahwa Bali memang rawan krisis air.

Ia mengingatkan kondisi ini akan bertambah parah jika Bali gagal melindungi kawasan tadah hujan. "Jika Bali gagal menangkap curah hujan, lam-

bat laun sumber mata air akan mengering. Air permukaan yang selama ini menjadi ladang bisnis PDAM dan pengelola AMDK juga akan mengalami penurunan debit," ujarnya.

Untuk itu, katanya, tata kelola bisnis air di Bali harus segera dibenahi dan diawasi. Produksi AMDK harus disesuaikan dengan izin yang direkomendasikan pemerintah. Ini penting agar tidak terjadi eksploitasi air secara besar-besaran untuk kepentingan bisnis. "Yang tak kalah pentingnya, Bali harus membatasi izin AMDK," sarannya.

Ia mengingatkan pemerintah agar mewajibkan PDAM dan pengelola AMDK di Bali melakukan investasi. Caranya bisa dalam bentuk penanaman pohon, menjaga kawasan hulu termasuk membuat tanggul di aliran sungai, termasuk menjaga daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, bisa dilakukan dengan pembuatan sumur resapan. Langkah terakhir ini bisa dianalogikan dengan melakukan program isi ulang terhadap kandungan air dalam perut bumi. Langkah ini penting dilakukan agar air hujan bisa ditampung, sehingga tak terbuang percuma ke laut. "Sebagai pengelola bisnis

air, PDAM dan perusahaan AMDK harus menyisihkan keuntungannya untuk menjaga kawasan tangkapan air hujan," tegasnya.

Sudarma mengingatkan pemerintah Bali agar tak menganggap ancaman krisis air ini hal sepele. Fakta bahwa banyak daerah di Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang dilanda kekeringan harus segera diantisipasi. Terlebih, Bali sebagai pulau kecil kini dijejali investasi dan pertumbuhan penduduk yang tak terkendali.

Saat ini mungkin saja suplai air masih aman-aman saja. Namun, jika dicermati lebih dalam kini banyak penduduk Bali yang gagal mendapat layanan PDAM. Deretan daftar tunggu permohonan sambungan PDAM ini merupakan angka yang patut diurai sebagai masalah kehidupan. Pendekatan bisnis tak bisa mengatasi masalah ini tanpa diimbangi pendekatan lingkungan. Sudarma menegaskan, hanya investasi terhadap pelestarian alam Bali yang bisa menyelamatkan penduduk Bali terhindar dari ancaman krisis air. (dir)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 1 dan 19



Lemah, Pengawasan Proyek Gedung Kantor DKP Buleleng

Singaraja (Bali Post) –

Pengawasan proyek gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Buleleng di Banyuning, Singaraja, dinilai lemah. Bahkan, ada item pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Item pekerjaan itu menyangkut pemasangan baja. Dalam dokumen perencanaan harus dilakukan oleh perusahaan bersertifikat khusus, tetapi fakta di lapangan yang mengerjakan justru tidak memiliki sertifikat keahlian.

Demikian temuan Komisi II DPRD Buleleng ketika meninjau pelaksanaan proyek gedung DKP Selasa (11/8) kemarin. Rombongan lembaga dewan itu dipimpin Ketua Komisi II Putu Mangku Budiassa bersama anggotanya. Di lokasi proyek senilai Rp 4,6 miliar itu rombongan serius mengamati pelaksanaan proyek. Tak hanya memerhatikan aktivitas pekerjaan,

namun dokumen perencanaan pun ditelusuri dengan saksama. Dalam dokumen perencanaan proyek tertera pekerjaan pemasangan baja dilakukan oleh pekerja yang memiliki sertifikat keahlian di bidangnya. Dewan kemudian mencocokkan dengan mewawancarai pekerja, ternyata tidak memiliki sertifikat keahlian. Rata-rata pendidikan pekerja itu hanya tamat SMP dan bahkan, ada yang tidak tamat sekolah alias *drop out* (DO).

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiassa meyakini proyek gedung kantor DKP dan pembangunan areal parkir kendaraan itu pengawasannya sangat lemah. Karena pengawasan lemah, item pekerjaan pemasangan baja yang harusnya dilakukan pekerja yang berlisensi, namun dikerjakan oleh pekerja yang tidak memiliki sertifikat seperti yang tertera dalam dokumen perencanaan proyek.

“Kami sangat terkejut karena konsultan pengawas tidak ada di lapangan. Tak heran kalau tukang las yang dipekerjakan untuk memasang baja itu tidak bersertifikat dan dibiarkan saja karena pengawasannya lemah,” tegasnya.

Budiassa meminta pelaksana proyek menghentikan pekerjaan khusus untuk item pekerjaan pemasangan baja. Penghentian ini sebagai peringatan agar pihak pelaksana proyek bisa mengevaluasi dan melakukan pekerjaan mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta penjelasan DKP dan pihak kontraktor pelaksana proyek. Sikap ini bukan untuk mencari kesalahan, namun bagaimana dewan sebagai kontrol pemerintah agar kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan kualitasnya pun bisa dipertanggungjawabkan karena setiap pembangunan oleh pemerintah menggunakan



Bali Post/kmb38

LEMAH - Komisi II DPRD Buleleng menilai pengawasan proyek gedung kantor DKP lemah.

anggaran yang bersumber dari uang rakyat. “Kami bukan menyalahkan siapa-sipa, tapi ini sebagai kontrol agar proyek itu berjalan sesuai perencanaan. Takutnya kalau perusahaan

yang mengerjakan item pekerjaan tidak berlisensi, sementara dokumen mengharuskan yang berlisensi, maka akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan proyek,” tegasnya. (kmb38)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 7



SIDAK - Wabup Kembang Hartawan melakukan sidak ke Bagian Ekbang untuk mengecek pencairan hibah, Selasa kemarin.

Pastikan Dana Hibah Cair Sesuai Waktu Wabup Kembang Sidak Bagian Ekbang

GUNA memastikan para penerima hibah menerima pencairan dana sesuai waktu, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Selasa (11/8) kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bagian Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan). Wabup yang melihat seluruh staf di Bagian Ekbang sibuk melayani pencairan dana hibah meminta agar dituntaskan tanggal 14 Agustus ini. Pihaknya juga mempersilakan kepada Kepala Bagian Ekbang Mangku Kusumayuda untuk menambah staf guna membantu apabila diperlukan agar bisa rampung sesuai waktu.

Melihat beberapa penerima hibah tampak ada yang berdiri dan duduk di lorong ruangan, Wabup juga meminta supaya pelayanan ditingkatkan dengan menambah kursi, sehingga para penerima hibah tidak sampai berdiri. Saat ini, menurut-

nya, kegiatan pemkab sangat padat, baik itu HUT Kota maupun HUT RI, namun bukan berarti mengganggu pelayanan. Seusai melakukan sidak, Wabup Kembang mengatakan dana hibah ini sudah terencana sejak setahun lalu dan dianggarkan dalam APBD serta disepakati DPRD. "Permohonannya sejak tahun lalu dan sudah direncanakan, sehingga sekarang tinggal pencairan saja," ujarnya.

Pihaknya sengaja datang untuk mengingatkan Bagian Ekbang agar segera menuntaskannya, sehingga tidak ada masalah. Pasalnya bagi kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada pencairan dana hibah agar sudah tuntas dilakukan tanggal 14 Agustus atau enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Untuk penyerahan bantuan hibah pun sebenarnya sudah dilaku-

kan secara simbolis ketika pihaknya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa. Sehingga saat ini, menurutnya, hanya dilakukan pencairan saja. "Kami minta agar segera dituntaskan sebelum tanggal 14 Agustus, untuk mengikuti aturan, apalagi kami calon *incumbent* dan kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015. Sehingga tidak ada tudingan macam-macam," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Ekbang Made Mangku Kusumayuda mengatakan untuk tahun 2015 ini penerima dana hibah sebanyak 900 kelompok dengan total dana Rp 7,5 miliar. Di antaranya masjid Rp 25 juta, mushola Rp 2,5 juta, *dadia* Rp 5 juta, kelompok pengajian Rp 2 juta. Sehingga pemkab hanya melayani untuk kelompok tempat ibadah dan upacara keagamaan saja. (ad852)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 12



Pemkab Diminta Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Gianyar (Bali Post) -

Pemkab Gianyar memiliki segudang PR dalam menuntaskan masalah infrastruktur. Untuk itu, Komisi II DPRD Gianyar mengingatkan pemerintah memprioritaskan anggaran tahun 2016 untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan.

Ketua Komisi II DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta, Selasa (11/8) kemarin mengungkapkan, berdasarkan hasil musrenbang, total dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencapai sekitar

Rp 400 miliar. Namun, dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016 baru bisa dirancang sekitar Rp 198 miliar.

Pada rapat kerja Komisi II dengan Dinas PU, Sudarta menegaskan, pihaknya memaklumi kondisi keuangan

daerah sehingga kebutuhan dana untuk infrastruktur tidak bisa serta merta diplot dalam satu tahun anggaran melainkan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, pemerintah bisa melakukan percepatan dalam tiap tahapannya. Dan khusus rancangan anggaran di Dinas PU dalam PPAS tahun 2016, pihaknya berharap angka tersebut tidak diubah atau dikurangi.

"Rancangan anggaran tersebut akan kita perjuangkan agar tak sampai dikurangi, bahkan bila perlu

ditingkatkan lagi mengingat kebutuhan dana untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur masih sangat besar," katanya.

Menurutnya, masih banyak infrastruktur jalan terutama jalan lingkungan yang dalam kondisi rusak. Ini sangat membutuhkan penanganan dari pemerintah dalam waktu dekat mengingat perekonomian masyarakat sangat bergantung dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti rencana perluasan

TPA Temesi yang menjadi kewenangan DKP Gianyar. Sesuai hasil rapat kerja dengan DKP, kemarin, pihaknya mengusulkan agar realisasi perluasan TPA dipercepat. Alokasi anggaran diharapkan bisa masuk dalam APBD induk 2016. Hal ini mengingat kondisi TPA Temesi saat ini sudah *overload*.

"Awalnya direncanakan dianggarkan di APBD Perubahan 2016. Tapi kami di Komisi II inginnya bisa masuk di induk, supaya ada percepatan," katanya. (kmb25)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 9



Sidang Korupsi Dermaga Gunaksa

Jaksa Tetap pada Tuntutan, PH Tetap pada Pledoi

Denpasar (Bali Post) -

Sidang jawab-menjawab antara jaksa dengan tim pembela hukum (PH) atau pengacara, atas dugaan korupsi Dermaga Gunaksa dengan terdakwa tim sembilan memasuki tahap akhir. Selasa (11/8) kemarin, jaksa A.A. Gede Putra menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada tuntutan. Sedangkan PH terdakwa yang dikomando Simon Nahak dalam repliknya juga tetap pada pledoinya. Sehingga majelis hakim akan memutus perkara ini dalam sidang pekan depan.

Dalam sidang yang terbagi dalam tiga berkas perkara itu dilakukan tiga kali sidang kemarin. Pertama, sidang untuk terdakwa Ketut Janapria, mantan Sekda Klungkung yang adalah Ketua Tim 9, Asisten I Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I tim 9 Made Ngu-rah, dan Kepala BPN Klungkung yang juga Wakil Ketua II Sagung Mastini.

JPU A.A. Gede Putra intinya tetap pada tuntutan semula. Pihaknya pun menyatakan tidak akan menanggapi seluruh keberatan yang diajukan

oleh para terdakwa dan penasihat hukum. "Kami tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan ajukan pada persidangan Senin 3 agustus 2015 sekaligus apa yang kami sampaikan dalam replik memperkuat surat tuntutan kami," ujar A.A. Gede Putra.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Beslin Sihombing ini, jaksa kemudian menyerahkan penilaian sepenuhnya pada majelis hakim dalam sidang putusan mendatang. Usai JPU membacakan replik, Hakim Ketua Beslin Sihombing

pun memberikan kesempatan kepada para penasihat hukum pada terdakwa yang dikomandani Simon Nahak untuk menanggapi replik. Simon Nahak menyatakan tetap pada pledoi. "Kami tim penasihat hukum dan para terdakwa telah berkoordinasi, tidak menggunakan hak untuk menanggapi replik dan tetap pada pledoi," jelas Simon Nahak. Putusan pun akan dibacakan Selasa 18 Agustus mendatang. "Sidang putusan akan digelar Selasa tanggal 18 Agustus," ujar Beslin Sihombing. (kmb37)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 3



Soal Rencana Penutupan Galian C Tak Berizin

Sekda Yakin Bisa, Dewan Pesimis

Amlapura (Bali Post) -

Rencana penutupan galian C tak berizin ditanggapi berbeda antara dewan dan eksekutif. Eksekutif melalui Sekda Karangasem Ir. I Gde Adnya Mulyadi merasa yakin bisa dan harus bisa menertibkan usaha galian C liar.

Namun, anggota DPRD Karangasem Ir. Ketut Kerta mengaku pesimis penjabat atau Bupati Karangasem bakal mampu menertibkan usaha galian C tanpa izin. Alasannya, keberadaan galian C itu dirasakan dampaknya positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketut Kerta asal Desa Buana Giri, Karangasem, Selasa (11/8) kemarin, pada rapat membahas KUPA APBD Perubahan 2015. Sementara Sekda Karangasem Ir. Gde Adnya Mulyadi selaku pejabat pemerintah merasa yakin bisa menertibkan usaha galian C tanpa izin.

Soalnya, kata Adnya asal Bebandem itu, penutupan galian C

tanpa izin itu berdasarkan perintah atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana saat melakukan pemeriksaan terhadap APBD Karangasem tahun 2014, ditemukan ada sekitar Rp 5,8 miliar, pajak galian C dipungut dari usaha galian C tanpa izin. BPK tak membolehkan lagi, Pemkab Karangasem memungut pajak dari usaha galian C tanpa izin itu. "Kita harus berusaha dan harus bisa menertibkan galian C tanpa izin itu. Kalau tidak, pemkab disalahkan dan pengusaha galian tanpa izin itu bisa ditangkap aparat yang berwenang," katanya.

Kerta mengajak eksekutif membuka wacana untuk mer-

evisi peraturan yang mengatur yang selama ini menyebabkan Pemkab Karangasem tak bisa mengeluarkan izin galian C pada wilayah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Menurutnya, Perda RTRW dibuat dewan bersama eksekutif dan karenanya bisa direvisi. Nantinya, diminta batas ketinggian penggalian tak dicantumkan. "Saya mengajak membuka wacana merevisi perda itu, semoga tak menyalahi peraturan yang di atasnya," katanya.

Kerta mengatakan, kalau pun nanti Pemkab Karangasem menertibkan usaha galian C tak berizin, dia minta agar pemerintah bersikap adil. Jangan sampai ada yang ditertibkan, ada yang tidak

"Kalau ditertibkan, dilakukan secara adil. Semua yang tak berizin harus ditertibkan, kalau tidak, nanti timbul masalah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, karena ada rekomendasi dari BPK, Sekda Adnya Mulyadi mengatakan, pada 2016 akan mulai menertibkan usaha galian C tanpa izin. Tahun ini belum mulai dilakukan, tetapi baru sebatas sosialisasi. "Karena penertiban galian C tanpa izin itu perintah aturan dan sudah direkomendasikan BPK, nanti kami minta Dewan juga ikut mensosialisasikan bahwa usaha yang tidak berizin memang tak boleh beroperasi," katanya.

Sekda Adnya mengatakan, rencana penertiban galian C tanpa izin dilakukan di tiga kecamatan yang berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut seperti Rendang, Selat dan Bebandem.

Mereka dulu ada yang mengajukan izin, tetapi karena tata ruang tak memperbolehkan menggali di atas 500 MDPL, pemerintah tak berani mengeluarkan izinnya.

Nantinya, usaha galian C diarahkan ke wilayah Kecamatan Kubu. Di Kubu masih potensial, karena berada di bawah 500 MDPL. Soal medan jalan misalnya di Berina yang menanjak dan berkelok, nantinya pengangkutan diarahkan kepada kapal tongkang. Saat ini sudah ada yang melirik untuk pembangunan dermaga kapal tongkang untuk mengapalkan pasir, selain sudah ada satu dermaga di pantai Kecamatan Kubu. "Kalau pengapalan galian C dari Kubu, mesti galian C diarahkan ke sana, diharapkan jalan tak cepat rusak digilas ribuan truk tiap hari 24 jam sehingga pengguna jalan akan lebih senang," paparnya. (013)

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 13